

PENGARUH KARAKTERISTIK *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI GAS RUMAH KACA

Triana Chaerun Niza, Dwi Ratmono¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the relation between the characteristics of corporate governance and greenhouse gas emissions disclosure. The characteristics of corporate governance that used were the proportion of female commissioners, the proportion of independent board members, the number of board members, the number of audit committee members, the frequency of audit committee meetings, and the financial competence of audit committee members. The population are the non-financial company listed on Indonesia Stock Exchange in 2015-201. Then there were 69 samples. Multiple regression analysis is used to test the hypothesis. The results indicate that the proportion of independent board members and the frequency of audit committee meetings have a positive significant effect to greenhouse gas emissions disclosure. Whereas the proportion of female commissioners, the number of board members, the number of audit committee members, and the financial competence of audit committee members did not affect the greenhouse gas emissions disclosure.

Keywords: Corporate Governance, Greenhouse Gas Emissions Disclosure, Board of Commissioners, Audit Committee.

PENDAHULUAN

Pemanasan global telah menjadi isu yang penting di berbagai negara saat ini. Terjadinya peningkatan pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang cukup ekstrim. Salah satu akibat dari adanya perubahan iklim adalah mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang menyebabkan runtuhnya beberapa pemukiman penduduk di Siberia. Pemanasan terjadi karena adanya kenaikan emisi gas rumah kaca di lapisan udara dekat dengan permukaan bumi. Gas rumah kaca atau selanjutnya disebut GRK terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adalah karbondioksida (CO₂), nitrooksida (N₂O), metana (CH₂) dan unsur-unsur lainnya (Samidjo dan Suharso, 2017). Salah satu unsur dalam GRK adalah karbondioksida yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas bumi. Penggunaan bahan bakar fosil erat kaitannya dengan proses industrialisasi dan transportasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat keterlibatan perusahaan atas operasional perusahaan terhadap peningkatan emisi GRK.

Menurut (Samidjo dan Suharso, 2017), 2/3 penyumbang emisi GRK di Indonesia adalah berasal dari sektor industri, energi untuk listrik dan transportasi. *World Resources Institute* juga mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu dari delapan negara terbesar penghasil emisi GRK di dunia. Pada tahun 2012 Indonesia diperkirakan menghasilkan 1,454 juta metrik ton emisi GRK dan sebanyak 38% dihasilkan dari sektor energi yang menghasilkan karbondioksida. Untuk menangani masalah ini, maka pemerintah Indonesia membuat beberapa peraturan. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau RAN-GRK. Peraturan ini digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan usaha atau upaya untuk menurunkan emisi GRK. Rencana dalam RAN-GRK ini adalah pada tahun 2020 Indonesia akan menurunkan emisi hingga 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Dan perencanaan untuk paska tahun 2020 adalah sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional.

Untuk mencapai target RAN-GRK, maka pemerintah membutuhkan bantuan atau kerja sama dari perusahaan karena terdapat perusahaan yang ikut andil dalam peningkatan emisi GRK akibat dari operasional dari perusahaan. Untuk mendukung rencana tersebut, maka Kementerian

¹ Corresponding author

Lingkungan Hidup membuat sebuah program yaitu Proram Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Program ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Pemerintah akan memberikan peringkat kepada perusahaan yang didasarkan pada kinerja lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan dan tanggung jawab sosial terbaik akan mendapatkan peringkat emas yang merupakan peringkat tertinggi.

Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dapat dilihat dalam laporan keberlanjutan atau *sustainability report*, termasuk di dalamnya adalah pengungkapan emisi GRK. Perusahaan agar dapat menjalankan kinerja dan tanggung jawab yang baik maka membutuhkan tata kelola perusahaan atau *corporate governance* yang baik. Karena keputusan perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau tidak juga dipengaruhi oleh *corporate governance*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi GRK.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori agensi dan teori *stakeholder*. Jensen dan Meckling (1974) mengatakan bahwa hubungan keagengan merupakan sebuah kontrak antara pemilik perusahaan yaitu investor (*principal*) dengan manajer (*agent*), manajer diberikan beberapa otoritas untuk pengambilan keputusan sebagai perwakilan investor di perusahaan. Rokhlinasari (2007) menjelaskan bahwa dalam teori agensi ini dapat terjadi masalah asimetri informasi (*information asymmetry*) karena adanya kontrak tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi masalah keagengan adalah dengan menggunakan peran dewan komisaris. Dewan komisaris berperan untuk memantau dan mendisiplinkan manajemen perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik (*principal*) yaitu investor kepada mereka (Healy dan Palepu, 2001). Sedangkan teori *stakeholder* menyatakan perusahaan tidak beroperasi untuk memenuhi kepentingan perusahaan saja, tetapi untuk kepentingan *stakeholder* juga (Ghozali dan Chariri, 2014).

Karena adanya kemungkinan terjadi asimetri informasi, maka *agent* akan meningkatkan pengungkapan informasi perusahaan untuk memperkecil asimetri informasi antara pihak perusahaan dengan pihak luar atau *stakeholder* perusahaan. Dewan komisaris akan melakukan pengawasan terhadap kinerja *agent* untuk memastikan pengungkapan informasi seperti emisi GRK yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dewan komisaris juga akan dibantu oleh komite audit dalam fungsi pengawasannya. Pengungkapan emisi GRK ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi *stakeholder* seperti calon investor dan calon kreditor untuk melihat bagaimana keberlanjutan dari perusahaan yang digambarkan dengan tanggung jawab perusahaan akan kerusakan lingkungan yang disebabkan perusahaan. Pemerintah juga dapat menggunakan laporan lingkungan perusahaan untuk penilaian peringkat PROPER.

Pengaruh Proporsi Anggota Dewan Komisaris Perempuan Terhadap Pengungkapan Emisi GRK

Teori agensi menyatakan terdapat kemungkinan perbedaan keinginan dan kepentingan antara *principal* atau pemilik perusahaan dengan *agent* atau manajemen yang mengelola perusahaan. Rokhlinasari (2007) juga menjelaskan bahwa dalam teori agensi ini terdapat asimetri informasi yang dapat mengakibatkan *agency cost* sehingga merugikan perusahaan karena berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Untuk menangani masalah *agency cost*, perusahaan dapat menggunakan peran dewan komisaris. Dewan komisaris berperan untuk memantau dan mendisiplinkan manajemen perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh *principal* kepada *agent* (Healy dan Palepu, 2001).

Salah satu karakteristik yang sering diperdebatkan dalam susunan dewan komisaris adalah keberagaman *gender*. Karena laki-laki dan perempuan secara tradisional, budaya dan sosial berbeda. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perempuan secara umum lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan dibandingkan laki-laki (Liao, Luo, dan Tang, 2014). Dewan komisaris perempuan akan lebih mudah menerima peraturan yang berhubungan dengan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Bear dan Post (2010) menunjukkan bahwa kehadiran anggota dewan komisaris perempuan meningkatkan pengungkapan lingkungan dan CSR perusahaan.

Penelitian oleh Liao, Luo, dan Tang (2014) juga menunjukkan kehadiran anggota dewan komisaris perempuan berhubungan positif terhadap pengungkapan emisi GRK. Sehingga dapat diprediksikan bahwa adanya anggota dewan komisaris perempuan dalam susunan dewan komisaris perusahaan dapat meningkatkan kecenderungan pengungkapan emisi GRK oleh perusahaan. Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1 : Proporsi Anggota Dewan Komisaris Perempuan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi GRK

Pengaruh Proporsi Anggota Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Emisi GRK

Menurut teori *stakeholder*, perusahaan tidak beroperasi hanya untuk kepentingan perusahaan saja, namun juga untuk kepentingan *stakeholder*. Oleh karena itu, dalam susunan dewan komisaris perusahaan harus terdapat pihak yang independen, yaitu pihak yang berasal dari luar perusahaan. Dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan. Sehingga komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa setiap perseroan terbatas harus memiliki setidaknya 1 atau lebih komisaris independen. Komisaris independen ini diharapkan dapat menjadi perwakilan bagi *stakeholder* untuk memastikan bahwa perusahaan juga memikirkan keuntungan bagi para *stakeholder* yang tidak memiliki kuasa secara langsung di dalam perusahaan.

Dengan adanya laporan atau pengungkapan yang berkaitan dengan emisi GRK maka dapat menjadi bahan pertimbangan bagi *stakeholder*, seperti calon investor maupun kreditor. *Stakeholder* dapat melihat bagaimana kebijakan dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan melalui pengungkapan emisi GRK ini, namun pengungkapan ini akan membutuhkan dana yang lebih besar. Selain itu, dibutuhkan waktu yang panjang untuk dapat memperoleh nilai atau hasil dari laporan ini. Sehingga para pemimpin dan manajemen perusahaan akan berfikir ulang untuk melakukan pengungkapan itu karena investasi tersebut akan terbayar dalam waktu yang lama. Namun lain halnya dengan komisaris independen, komisaris independen akan lebih menekan manajemen untuk mengungkapkan laporan tersebut (Cahaya, 2011). Penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa komisaris independen akan lebih condong pada kepentingan umum dan kepentingan *shareholder*, sehingga perusahaan akan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan lingkungan (Allegrini dan Greco, 2013; Chau dan Gray 2010). Oleh karena itu, maka dapat ditetapkan hipotesis :

H2 : Proporsi Anggota Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi GRK

Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Emisi GRK

Teori agensi atau teori keagenan merupakan teori yang mengungkapkan bahwa *principal* dan *agent* dapat memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya beberapa masalah seperti asimetri informasi yang akan berimbas pada *agency cost*. Asimetri informasi terjadi karena peran *principal* dan *agent* tidak sama dalam perusahaan, *agent* dianggap memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan sedangkan *principal* tidak. Hal ini terjadi karena *principal* telah memberikan kepercayaan kepada *agent* untuk mengurus perusahaan, sehingga *agent* akan lebih aktif di dalam perusahaan. Dewan komisaris menjadi cara untuk menangani masalah keagenan ini.

Dewan komisaris diyakini dapat menjadi penghubung manajemen dengan berbagai pemegang saham perusahaan. Fungsi utama dewan komisaris adalah untuk mengformulasikan kebijakan dan strategi yang akan dijalankan oleh manajemen (Chithambo dan Taurigana, 2016), sehingga dewan komisaris juga dapat membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengungkapan. Beberapa peneliti juga mengatakan perusahaan yang memiliki jumlah anggota dewan komisaris lebih tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi mengenai lingkungan dengan lebih banyak dan terinci (Allegrini dan Greco, 2013; Magnan, Aerts, dan Comier, 2010). Dari uraian ini maka dapat diajukan hipotesis :

H3 : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi GRK

Pengaruh Jumlah Komite Audit Terhadap Pengungkapan Emisi GRK

Teori agensi menjelaskan *principal* dan *agent* memiliki kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan. Perbedaan ini dapat menimbulkan asimetri informasi dan berujung pada penyalahgunaan wewenang oleh pihak *agent* atau manajemen perusahaan. Oleh karena itu, peran dewan komisaris dalam perusahaan dibutuhkan untuk mengawasi kinerja perusahaan. Untuk menjalankan perannya, dewan komisaris dibantu oleh komite audit. Komite audit bertugas untuk melakukan penelaahan atas informasi yang akan diungkapkan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Chtourou dan Courteau (2004) menjelaskan bahwa ukuran anggota komite audit yang besar memiliki pandangan, kompetensi, pengalaman dan keahlian yang beragam sehingga dapat meningkatkan pengawasan terhadap informasi perusahaan yang akan diungkapkan, terutama informasi yang berkaitan dengan lingkungan. Komite audit dapat mengungkapkan dan menyelesaikan potensi masalah yang dapat terjadi dalam informasi yang akan diungkapkan perusahaan (Li, dkk 2012). Penelitian Allegrini dan Greco (2013) menunjukkan ukuran komite audit yang besar akan mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan. Kamel, dkk (2014) juga mendukung penelitian sebelumnya bahwa ukuran komite audit yang besar akan meningkatkan potensi pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) perusahaan seperti pengungkapan emisi GRK. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Proporsi Anggota Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi GRK

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Emisi GRK

Berdasarkan teori agensi, adanya pemisahan antara manajemen dan pengawasan dapat menghasilkan asimetri informasi diantara keduanya. Asimetri informasi diakibatkan oleh perbedaan peran antara *principal* dan *agent* di perusahaan, *agent* memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan sedangkan *principal* tidak, hal ini dikarenakan oleh *principal* yang telah memberikan kepercayaan kepada *agent* untuk mengurus perusahaan. Dewan komisaris sebagai pelaksana fungsi pengawasan memiliki andil dalam menangani masalah keagenan ini.

Melalui komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris, komite audit dapat membantu fungsi pengawasan dewan komisaris dengan melakukan penelaahan pada laporan perusahaan yang akan dipublikasikan. Komite audit memiliki tugas untuk menelaah informasi yang akan dipublikasikan perusahaan. Frekuensi rapat komite audit yang tinggi merepresentasikan tanggung jawab komite audit dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi frekuensi rapat komite audit maka semakin besar pula kemungkinan komite audit dapat mengetahui apabila terjadi masalah atau kesulitan dalam proses pengungkapan informasi perusahaan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Dengan keterlibatan komite audit dalam penyusunan informasi perusahaan maka semakin banyak pula informasi yang akan diungkapkan oleh perusahaan (Allegrini dan Greco, 2013). Dari uraian ini maka dapat ditarik hipotesis :

H5 : Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi GRK

Pengaruh Kompetensi Keuangan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Emisi GRK

Masalah keagenan yang dijelaskan dalam teori agensi bisa terjadi diantara *principal* dan *agent*. Asimetri informasi terjadi akibat perbedaan peran antara *principal* dan *agent*. *Principal* sudah memberikan wewenang kepada *agent* untuk menjalankan operasional perusahaan. Sehingga *agent* memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan sedangkan *principal* tidak. Untuk menghindari adanya penyelewengan yang dapat dilakukan oleh *agent* dalam menjalankan perusahaan, maka perusahaan memiliki dewan komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya, dewan komisaris memiliki beberapa komite dibawahnya, komite audit adalah salah satunya. Komite audit memiliki tugas untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dan mengawasi informasi yang akan diungkapkan oleh perusahaan.

Penelitian Mangena and Tauringana (2007) menyatakan bila anggota komite audit memiliki keahlian keuangan maka akan lebih memahami implikasi praktik pelaporan yang baik secara umum dan memahami kepatuhan terhadap peraturan pelaporan secara khusus. Komite audit yang tidak memiliki anggota dengan keahlian keuangan akan memiliki kemungkinan yang kecil dalam mendeteksi adanya masalah dalam proses pelaporan perusahaan (Agrawal, dkk 2015).

Sehingga adanya anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan akan meningkatkan potensi pelaporan perusahaan, seperti pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), CSR maupun pengungkapan emisi GRK. Penelitian sebelumnya oleh Allegrini dan Greco (2013) ; Mangena, dkk (2005) menunjukkan adanya hubungan positif antara kompetensi keuangan anggota komite audit terhadap pengungkapan *voluntary disclosure* perusahaan. Sehingga dari uraian tersebut, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Kompetensi Keuangan Anggota Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi GRK

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan emisi GRK yang menggunakan pengukuran berdasarkan penelitian Bae, dkk (2014). Index pengukuran disusun berdasarkan faktor-faktor yang teridentifikasi dalam lembar Permintaan Informasi oleh *Carbon Disclosure Project* (CDP) dengan lima kategori utama yang diidentifikasi lagi sehingga menjadi lebih spesifik yaitu 18 item. Nilai 1 diberikan apabila item diungkapkan perusahaan, dan nilai 0 diberikan apabila item tidak diungkapkan. Kalkulasi index pengungkapan GRK dilakukan dengan menjumlahkan seluruh item yang diungkapkan pada setiap perusahaan atau sampel lalu dibagi dengan jumlah item yaitu 18.

Berdasarkan penelitian Liao, Luo, dan Tang (2014), proksi proporsi anggota dewan komisaris perempuan dihitung dengan menjumlah seluruh anggota dewan komisaris perempuan dibagi dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Begitu juga dengan proporsi anggota dewan komisaris independen dengan menjumlahkan seluruh anggota dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Chithambo dan Tauringana (2016) menghitung variabel jumlah anggota dewan komisaris dengan menjumlah seluruh anggota dalam dewan komisaris perusahaan. Begitu juga jumlah anggota komite audit dengan menjumlahkan seluruh anggota komite audit perusahaan berdasarkan Appuhami dan Tashakor (2016). Proksi frekuensi rapat komite audit berdasarkan penelitian Appuhami dan Tashakor (2016) dilakukan dengan menjumlah seluruh rapat komite audit yang dilakukan selama setahun. Sedangkan kompetensi keuangan anggota komite audit dilakukan dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang memiliki kompetensi keuangan dibagi dengan jumlah semua anggota komite audit.

Variabel kontrol *share option* menurut Liao, Luo, dan Tang (2014) dilakukan dengan memberikan nilai 1 jika *share option* termasuk dalam remunerasi dewan komisaris, dan apabila tidak termasuk remunerasi maka nilai 0. Variabel *ownership concentration* dilihat dari persentase pemegang saham dengan total kepemilikan lebih dari 5% di dalam perusahaan. *Firm size* atau ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan logaritma natural pada total aset perusahaan (Liao, Luo, dan Tang, 2014), sedangkan *leverage* dihitung dengan menggunakan rasio total utang perusahaan dengan total aset. Proksi ROA dilakukan dengan menghitung ratio laba bersih setelah pajak terhadap total aset.

Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI selama kurun waktu 2015-2017 sebagai populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam BEI selama kurun waktu 2015-2017 yang mengungkapkan *annual report* dan *sustainability report* yang terkait dengan pengungkapan lingkungan selama tiga tahun berturut-turut.

Metode Analisis

Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dari semua data tentang variabel yang telah dikumpulkan dan dianalisis melalui persamaan regresi linear berganda. Berikut adalah gambaran persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini :

$$\begin{aligned}
 \text{GRK} = & \beta_0 + \beta_1 \text{GENDER} + \beta_2 \text{INDEPENDEN} + \beta_3 \text{BOARDSIZE} + \beta_4 \text{ACSIZE} \\
 & + \beta_5 \text{ACMEET} + \beta_6 \text{ACEPERT} + \beta_7 \text{BOARDMEET} \\
 & + \beta_8 \text{SHAREOP} + \beta_9 \text{OWNCO} + \beta_{10} \text{FIRMSIZE} + \beta_{11} \text{LEVERAGE} \\
 & + \beta_{12} \text{ROA} + e
 \end{aligned}$$

Keterangan :

β_0	: Konstanta
GRK	: Gas Rumah Kaca
GENDER	: Proporsi Anggota Dewan Komisaris Perempuan
INDEPENDEN	: Proporsi Anggota Dewan Komisaris Independen
BOARDSIZE	: Jumlah Anggota Dewan Komisaris
ACSIZE	: Jumlah Anggota Komite Audit
ACMEET	: Frekuensi Rapat Komite Audit
ACEPERT	: Kompetensi Keuangan Anggota Komite Audit
BOARDMEET	: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
SHAREOP	: <i>Share Option</i>
OWNCO	: <i>Ownership Concentration</i>
FIRMSIZE	: <i>Firm Size</i>
LEVERAGE	: <i>Leverage</i>
ROA	: ROA
e	: <i>Error</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari idx dan laman web masing-masing perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam BEI pada kurun waktu 2015-2017 yang berjumlah 1.336 perusahaan. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria : perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam BEI selama kurun waktu 2015-2017 yang mengungkapkan *annual report* dan *sustainability report* secara berturut-turut. Hasil populasi dan dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Hasil Populasi dan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam BEI tahun 2015	428
Perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam BEI tahun 2016	438
Perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam BEI tahun 2017	470
Perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2015-2017, tidak mengungkapkan <i>sustainability report</i> selama tiga tahun berturut-turut	(1.267)
Sampel Penelitian	69

Sumber : Pengolahan data sekunder tahun 2019

Deskripsi Variabel

Dari 69 sampel yang digunakan, diambil 6 variabel karakteristik *corporate governance* yang diduga mempengaruhi pengungkapan emisi GRK, terdapat juga 6 variabel kontrol serta 1 variabel dependen yaitu mengenai pengungkapan emisi GRK. Karena menggunakan data dalam waktu yang berurutan, maka dapat dilihat tren pengungkapan emisi GRK yang dilakukan oleh perusahaan dalam sampel penelitian ini pada tahun 2015-2017. Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, ke tiga belas variabel tersebut dianalisis untuk mencari gambaran mengenai *mean*, deviasi standar, nilai maksimum, dan nilai minimum dari setiap variabel. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2 dan tabel 4.3.

Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Deviasi Standar
GRK	69	0,11	0,72	0,4179	0,176
GENDER	69	0,00	0,33	0,0654	0,098
INDEPENDEN	69	0,29	0,80	0,3885	0,110
BOARDSIZE	69	3,00	12,00	6,5652	1,736
ACSIZE	69	3,00	6,00	3,4058	0,734
ACMEET	69	4,00	47,00	14,029	12,07
ACEXPERT	69	0,25	1,00	0,5377	0,192
BOARDMEET	69	4,00	49,00	14,377	10,26
SHAREOP	69	0,00	1,00	0,2464	0,434
OWNCO	69	35,00	100,00	68,956	14,48
FSIZE	69	23,44	33,32	30,637	1,861
LEV	69	13,31	76,82	50,185	17,48
ROA	69	-5,67	52,67	7,6458	11,15

Sumber : Output eviws, olah data sekunder tahun 2019

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif Variabel Dependen

Tahun	Jumlah Pengungkapan Emisi GRK	Persentase
2015	170	41,06%
2016	169	40,82%
2017	180	43,48%

Sumber : Pengolahan data sekunder tahun 2019

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa hasil nilai rata-rata (*mean*) adalah 0,4179 yang menunjukkan rata-rata pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan sebesar 41,79% dari total indikator pengungkapan emisi GRK yang digunakan. Nilai maksimum GRK adalah 0,72 atau sebesar 72% dari keseluruhan indikator luas pengungkapan emisi GRK. Sedangkan nilai minimumnya adalah 0,11 atau sebesar 11%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan tingkat pengungkapan emisi GRK di Indonesia masih tergolong rendah. Rata-rata persentase pengungkapan emisi GRK yang diungkapkan oleh perusahaan dapat dilihat pada tabel 4.3, terlihat bahwa persentase jumlah indikator yang diungkapkan pada tahun 2015 sebesar 41,05%, pada tahun 2016 berkurang sebesar 0,26% kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 2,66%. Sedangkan dari lima kategori pengungkapan yang digunakan, jumlah pengungkapan yang paling banyak adalah pada kategori Emisi Gas Rumah Kaca atau GHG.

Nilai *mean* proporsi anggota dewan komisaris perempuan menunjukkan angka 0,0654, menandakan rendahnya proporsi anggota dewan komisaris perempuan yaitu 6,54%. Nilai maksimum yang tertera adalah 0,33 sedangkan nilai minimumnya adalah 0% yang menandakan banyak dewan komisaris perusahaan yang tidak memiliki anggota dewan komisaris perempuan.

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa *mean* dari variabel proporsi dewan komisaris independen adalah 0,3885 atau sebesar 38,85%. Nilai minimum adalah 29%, sedangkan nilai maksimumnya menunjukkan angka 80%.

Pada tabel 4.2 menunjukkan *mean* jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6,5652 lebih besar dibandingkan nilai deviasi standar yaitu 1,736. Nilai minimum menunjukkan angka 3, sedangkan nilai maksimum menunjukkan angka 12.

Nilai rata-rata jumlah anggota komite audit menunjukkan angka 3,4058 yang berarti perusahaan dalam sampel penelitian ini memiliki rata-rata jumlah anggota komite audit sebanyak 3 orang. Nilai minimum menunjukkan angka 3 dan angka maksimum menunjukkan angka 6.

Nilai rata-rata pada tabel 4.2 untuk frekuensi rapat komite audit menunjukkan angka 14,029 yang berarti perusahaan dalam sampel penelitian melakukan rapat komite audit rata-rata dalam setahun sebanyak 14 kali. Nilai minimum menunjukkan angka 4 yang berarti semua

perusahaan dalam sampel penelitian setidaknya telah menyelenggarakan rapat komite audit sebanyak 4 kali dalam setahun. Sedangkan nilai maksimum menunjukkan angka 47 kali rapat.

Acexpert merupakan variabel independen terakhir yang menggambarkan adanya anggota komite audit dengan kompetensi keuangan. Nilai minimum menunjukkan nilai 0,25 yang berarti terdapat perusahaan dengan komposisi anggota dengan kompetensi keuangan dalam komite audit paling sedikit sebesar 25% dari total keseluruhan. Nilai maksimum anggota komite audit dengan kemampuan atau kompetensi keuangan adalah sebesar 100%.

Boardmeet adalah variabel yang menggambarkan frekuensi rapat dewan komisaris perusahaan dalam satu tahun. Pada tabel 4.2 terdapat nilai rata-rata pada angka 14,377 yang berarti dalam satu tahun, rata-rata rapat dewan komisaris yang dilakukan oleh perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 14 kali. Nilai minimum sebanyak 4 kali rapat dalam setahun. Sedangkan nilai maksimum adalah sebanyak 49 rapat dewan komisaris.

Shareoption pada tabel 4.2 menunjukkan nilai rata-rata pada angka 0,2464. Nilai minimum menunjukkan angka 0,00 yang berarti banyak perusahaan yang tidak memberikan opsi saham terhadap dewan komisaris sebagai bagian dari remunerasi. Sedangkan perusahaan yang memberikan opsi saham terhadap dewan komisaris terhitung hanya sebanyak 17 sampel dalam perusahaan selama periode penelitian.

Ownership concentration menunjukkan konsentrasi kepemilikan saham perusahaan dalam sampel penelitian yang dimiliki oleh pihak mayoritas yaitu di atas 5% kepemilikan. Dapat dilihat bahwa nilai rata-rata variabel ini adalah 68,956 yang berarti rata-rata kepemilikan perusahaan sebesar 68,96% dimiliki oleh pemegang saham mayoritas di atas 5%. Sedangkan nilai minimal yang dimiliki pemegang saham mayoritas perusahaan adalah sebesar 35%. Nilai maksimal kepemilikan saham mayoritas sebesar 100%.

Firmsize merupakan ukuran perusahaan dalam sampel penelitian ini. Nilai rata-rata menunjukkan angka 30,637. Nilai minimum adalah 23,44%, sedangkan nilai maksimum adalah 33,32%.

Leverage dihitung dengan *debt to total assets ratio*. Hasil statistik deskriptif memperlihatkan rata-rata dengan nilai 50,185, menandakan rata-rata aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang sebesar 50,19%. Nilai minimum adalah sebanyak 13,31%, sedangkan nilai maksimal adalah 76,82%.

Hasil pada tabel 4.2 memperlihatkan rata-rata ROA dengan nilai 7,6458, menandakan aset perusahaan dapat menghasilkan laba rata-rata sebesar 7,65%. Nilai minimal ROA sebesar -5,67%, sedangkan nilai maksimumnya adalah 52,67%.

Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melakukan uji hipotesis pada subbab sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan. Rangkuman hasil dari pengujian hipotesis dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Coefficient	Prob.	Kesimpulan
Proporsi anggota dewan komisaris perempuan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi GRK	-0,277328	0,1670	H1 ditolak
Proporsi anggota dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi GRK	0,703543	0,0160	H2 didukung
Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi GRK	-0,000849	0,9458	H3 ditolak
Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi GRK	-0,037838	0,0725	H4 ditolak
Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi GRK	0,004883	0,0477	H5 didukung
Kompetensi keuangan anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi GRK	-0,013365	0,9104	H6 ditolak

Sumber : Output evIEWS, olah data sekunder tahun 2019

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan metode OLS pada tabel 4.4, terlihat nilai *p-value* sebesar 0,1670 dengan nilai koefisiensi regresi yang negatif yaitu -0,277328. Dengan nilai *p-value* yang lebih dari 0,05 maka H1 ditolak. Pada tabel 4.2 menunjukkan nilai minimum menunjukkan 0% yang menandakan banyak perusahaan yang tidak memiliki anggota dewan komisaris perempuan dalam susunan dewan komisaris. Hal ini dapat menjadi penyebab mengapa proporsi anggota dewan komisaris wanita dalam penelitian ini tidak mempengaruhi pengungkapan emisi GRK. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Liao, Luo, dan Tang (2014) yang menyatakan bahwa proporsi anggota dewan komisaris perempuan dalam susunan dewan komisaris perusahaan mempengaruhi kecenderungan dan tingkat pengungkapan emisi GRK. Hasil dari penelitian ini tidak seperti yang diasumsikan dalam teori agensi bahwa dengan adanya anggota dewan komisaris perempuan dalam perusahaan dapat mengurangi masalah asimetri informasi dengan pengungkapan emisi GRK oleh perusahaan.

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa H2 diterima dengan nilai *p-value* 0,016 dan arah koefisien yang positif yaitu 0,703543. Komisaris independen diyakini akan lebih condong pada kepentingan umum atau kepentingan *stakeholder*. Dengan adanya dewan komisaris independen akan menekan manajemen untuk melakukan pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan seperti pengungkapan emisi GRK. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Allegrini dan Greco, (2013) dan Liao, Luo, dan Tang (2014) yang menyatakan proporsi anggota dewan komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap kecenderungan pengungkapan emisi GRK pada pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Sejalan dengan teori *stakeholder* bahwa perusahaan tidak beroperasi hanya untuk memenuhi kepentingan perusahaan kepentingan *stakeholder* juga harus diprioritaskan. Sehingga dengan adanya dewan komisaris independen ini akan membantu dan memperjuangkan kepentingan *stakeholder*.

Tabel 4.4 memperlihatkan jumlah anggota dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan emisi GRK. Dengan nilai *p-value* lebih dari 0,05 yaitu 0,9458 dan arah koefisiensi yang negatif yaitu -0,000849, maka H3 ditolak. Perusahaan dengan anggota dewan komisaris yang besar diyakini dapat meningkatkan pengungkapan lingkungan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan emisi GRK. Namun hasil dari penelitian ini tidak mendukung asumsi tersebut. Rata-rata jumlah anggota dewan komisaris berdasarkan tabel 4.2 adalah 6 orang, dengan jumlah minimal 3 dan jumlah maksimal sebesar 12 orang. Karena rata-rata di Indonesia masih rendah, maka jumlah anggota dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan emisi GRK. Penelitian ini mendukung penelitian oleh Chithambo dan Tauringana (2016) yang menunjukkan adanya hubungan negatif yang tidak signifikan antara jumlah anggota dewan komisaris dengan pengungkapan emisi GRK.

Tabel 4.4 menunjukkan nilai *p-value* 0,0725, lebih dari 0,05 dan nilai koefisiensi yang negatif yaitu -0,037838, maka H4 ditolak. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan. Teori agensi menyatakan masalah keagungan dapat menimbulkan adanya asimetri informasi, oleh karena itu komite audit membantu tugas dewan komisaris untuk mengawasi kinerja perusahaan agar dapat mengurangi kemungkinan adanya asimetri informasi. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Appuhami dan Tashakor (2016), yang menyatakan perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang besar maka diyakini dapat meningkatkan pengungkapan informasi perusahaan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan seperti pengungkapan emisi GRK. Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Tabel 4.2 menunjukkan jumlah anggota komite audit memiliki nilai minimum 3 yang menandakan meskipun semua perusahaan dalam sampel penelitian ini telah sesuai dengan peraturan tersebut, namun rata-rata jumlah anggota komite audit di Indonesia masih sedikit yaitu hanya memenuhi batas minimal jumlah anggota komite audit.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.4 yang menunjukkan nilai *p-value* kurang dari 0,05 yaitu 0,0477 dengan arah koefisien yang positif yaitu 0,004883, maka H5 dalam penelitian ini didukung. Frekuensi rapat komite audit merepresentasikan tanggung jawab komite audit dalam menjalankan tugasnya. Komite audit yang sering melakukan rapat maka akan lebih memahami dan mengetahui apabila terjadi masalah dalam proses pengungkapan informasi perusahaan. Tabel 4.2 memperlihatkan rata-rata dari variabel ini adalah 14, yang berarti rata-rata rapat komite audit di Indonesia cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah rapat minimal yang diatur oleh OJK yaitu

sebanyak 4 kali dalam setahun. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Appuhami dan Tashakor, (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan yang lebih sering mengadakan rapat dalam setahun maka akan memudahkan komite audit dalam proses pengawasan informasi yang akan diungkapkan perusahaan. Penelitian ini mendukung teori agensi, komite audit yang lebih sering melakukan rapat maka akan membuat komite audit lebih efisien dalam menjalankan tugasnya. Komite audit dapat melakukan penelaahan informasi yang akan diungkapkan perusahaan dengan lebih rinci dan teliti, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya asimetri informasi dalam perusahaan.

Tabel 4.4 menunjukkan nilai *p-value* yaitu 0,9104, lebih dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar -0,01336, maka H_0 di tolak. Dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 dijelaskan bahwa komite audit wajib memiliki minimal 1 anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Dengan adanya anggota komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan, maka diharapkan dapat meningkatkan potensi pengungkapan informasi perusahaan terutama yang berkaitan dengan lingkungan dengan dasar pengetahuan tentang pasar modal (Allegrini dan Greco, 2013). Dalam penelitian, proporsi anggota komite audit yang memiliki kompetensi keuangan memiliki rata-rata sebesar 53,76%. Meskipun nilai rata-rata yang cukup tinggi karena lebih dari 50%, namun hal ini tidak menjamin dapat meningkatkan pengungkapan emisi GRK perusahaan. Meskipun demikian, adanya proporsi anggota komite audit dengan kompetensi keuangan dirasa dapat meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan dalam hal lainnya seperti pelaporan laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Appuhami dan Tashakor, (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi keuangan anggota tidak mempengaruhi

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji hubungan karakteristik *corporate governance* dengan pengungkapan emisi GRK. Karakteristik *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi anggota dewan komisaris perempuan, proporsi anggota dewan komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, frekuensi rapat komite audit dan kompetensi keuangan anggota komite. Terdapat juga frekuensi rapat dewan komisaris, *share option* dan *ownership concentration* sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol lainnya yang berkaitan dengan masalah *financial* adalah ukuran perusahaan, *leverage* dan *return on assets* (ROA). Penelitian ini menggunakan 69 sampel dari 23 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu 2015-2017. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Analisis pengungkapan emisi GRK dan karakteristik *corporate governance* diperoleh dari laporan perusahaan yang meliputi *annual report* dan *sustainability report*.

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis yaitu proporsi anggota dewan komisaris independen dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan emisi GRK. Sedangkan proporsi anggota dewan komisaris perempuan, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan kompetensi keuangan anggota komite audit tidak berhubungan terhadap pengungkapan emisi GRK. *Firm size* atau ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi GRK. *Ownership concentration* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi GRK. Jumlah anggota dewan komisaris, *share option*, dan ROA tidak mempengaruhi pengungkapan emisi GRK.

Penelitian ini menunjukkan beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya adalah penelitian ini menggunakan 23 perusahaan selama tiga tahun berturut-turut yaitu dari 2015 hingga 2017, dengan total 69 sampel. Hal ini karena tidak banyak perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report*. Dan berdasarkan hasil uji koefisiensi determinasi, ditemukan bahwa variabel pengungkapan emisi GRK (gas rumah kaca) hanya dapat dijelaskan sebesar 47%, yang berarti terdapat beberapa variabel lain yang mempengaruhi pengungkapan emisi GRK di luar dari model penelitian ini.

Kemudian, setelah mengkaji hasil penelitian ini maka saran yang dapat penulis ajukan untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan jumlah sampel perusahaan, seperti dari tahun 2014 hingga 2018. Penelitian selanjutnya akan lebih baik apabila menambahkan variabel lain diluar dari *corporate governance* yang berkaitan dengan pengungkapan emisi GRK, seperti kinerja perusahaan, harga saham dan variabel lainnya.

REFERENSI

- Agrawal, Anup, and Sahiba Chadha. 2005. "Corporate Governance and Accounting Scandals." *Journal of Law and Economics* 48(2): 371–406.
- Allegrini, Marco, and Giulio Greco. 2013. "Corporate Boards , Audit Committees and Voluntary Disclosure : Evidence From Italian Listed Companies." *Journal of Management Governance* 17: 187–216.
- Appuhami, Ranjith, and Shamim Tashakor. 2016. "The Impact of Audit Committee Characteristics on CSR Disclosure : An Analysis of Australian Firms." *Australian Accounting Review*: 1–21.
- Bae, Bo et al. 2014. "An Analysis of Australian Company Carbon Emission Disclosures." *Pacific Accounting Review* 25(1): 58–79.
- Bear, Stephen, Corinne Post, and Noushi Rahman. 2010. "The Impact of Board Diversity and Gender Composition on Corporate Social Responsibility and Firm Reputation." *Journal of Business Ethics* 97: 207–21.
- Cahaya, Fitra Roman. 2011. "Labour Practices and Decent Work Disclosures in Indonesia." School of Accounting, Curtin University.
- Chau, Gerald, and Sidney J Gray. 2010. "Family Ownership , Board Independence and Voluntary Disclosure : Evidence from Hong Kong." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 19(2): 93–109.
- Chithambo, Lyton, and Venancio Tauringana. 2016. "Corporate Governance and Greenhouse Gas Disclosure : A Mixed-Methods Approach." *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*: 1–43.
- Chtourou, Sonda Marrakchi, and Lucie Courteau. 2004. "The Effect of Audit Committee Expertise, Independence, and Activity on Aggressive Earnings Management." *Auditing : A Journal of Practice Theory* 23(2): 13–35.
- Healy, Paul M, and Krishna G Palepu. 2001. "Information Symmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature." *Journal of Accounting and Economics* 31: 405–40.
- Jensen, C, and H Meckling. 1974. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3(1976): 305–60.
- Kamel, Hisham, Zuaini Ishak, Nor Aziah, and Abdul Manaf. 2014. "The Impact of Audit Committee Characteristics on Corporate Voluntary Disclosure." *Social and Behavioral Sciences* 164: 486–92.
- Li, Jing, Musa Mangena, and Richard Pike. 2012. "The Effect of Audit Committee Characteristics on Intellectual Capital Disclosure." *The British Accounting Review* 44(2): 98–110.
- Liao, Lin, Le Luo, and Qingliang Tang. 2014. "Gender Diversity , Board Independence , Environmental Committee and Greenhouse Gas Disclosure." *The British Accounting Review*: 1–16.
- Magnan, Michel, Walter Aerts, and Denis Cormier. 2010. "Corporate Governance and Information Asymmetry between Managers and Investors." *Corporate Governance* 10(5): 574–89.



Mangena, Musa, Richard Pike, Musa Mangena, and Richard Pike. 2005. "The Effect of Audit Committee Shareholding , Financial Expertise and Size on Interim Financial Disclosures." *Accounting and Business Research* 35(4): 327–49.

Mangena, Musa, and Venancio Tauringana. 2007. "Corporate Compliance with Non- Mandatory Statements of Best Practice : The Case of the ASB Statement on Interim Reports." *European Accounting Review* 16(2): 399–427.

Rokhlinsari, Sri. 2007. "Teori-Teori Dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan." *Journal of Experimental Psychology: General* 136(1): 23–42.

Samidjo, Jacobus, and Yohanes Suharso. 2017. "Memahami Masalah Global Dan Perubahan Iklim." *Majalah Ilmiah Pawiyatan* 24(2): 1–10.